

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI DI DESA PAKKAT HAUAGONG
KECAMATAN PAKKAT KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN**

SKRIPSI

SKRIPSI

OLEH:

AMAN SANDRO SARUMPAET

178510011

AMAN SANDRO SARUMPAET

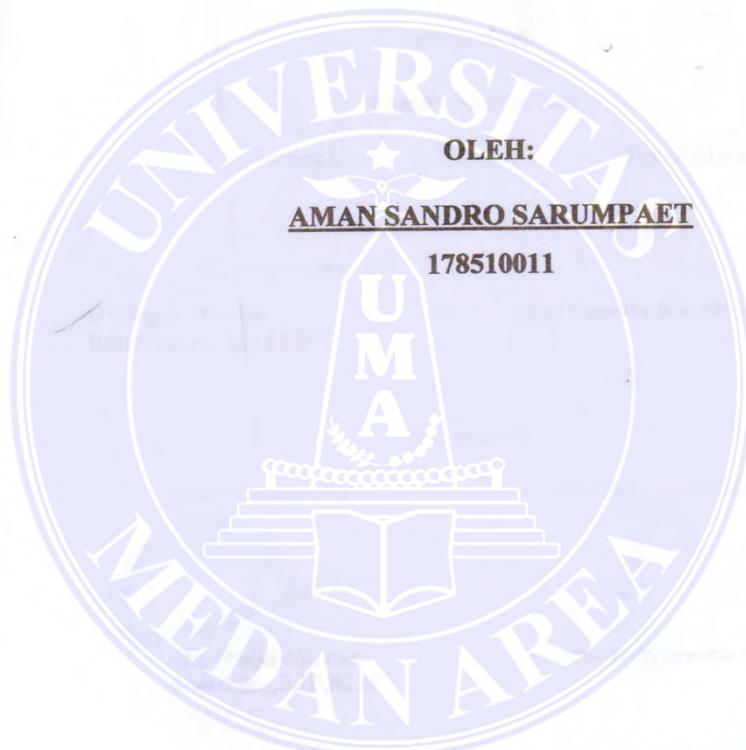
178510011



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI DI DESA PAKKAT HAUAGONG
KECAMATAN PAKKAT KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN**

SKRIPSI



OLEH:

AMAN SANDRO SARUMPAET

178510011

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan
NAMA : Aman Sandro Sarumpaet
NPM : 178510011

FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Beby Masito
Batubara, S.Sos, MAP


Evi Yuniata Kurniaty, S.Sos, M.IP

Mengetahui :

Dekan Fakultas ISIPOL

Ka Prodi Ilmu Pemerintahan


Dr. Walid Mustafa
Sembiring, S.IP, M.IP


Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Aman Sandro Sarumpaet

178510011



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aman Sandro Sarumpaet
NPM : 178510011
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area. Hak Bebas Royalti *Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan

Dengan Hak Bebas Royalti *Noneklusif* ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihkan media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal :

Yang Menyatakan



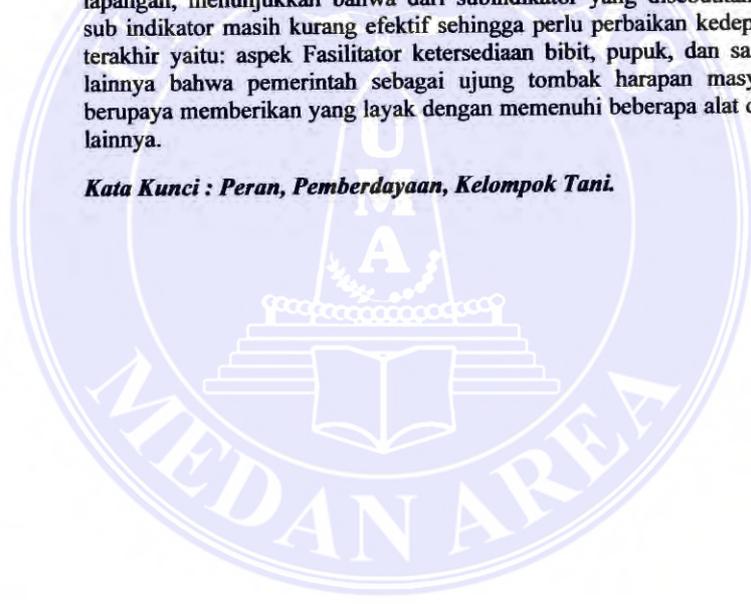
Aman Sandro Sarumpaet
178510011

ABSTRAK

Sebagai salah satu Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan, maka Pemerintah Desa Pakkat memiliki tanggung jawab dan peran yang penting dalam memberdayakan kelompok tani agar berkualitas dan mampu berdaya saing. Namun hal tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan, tentunya memiliki beberapa permasalahan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis di Desa Pakkat masih ditemukannya masalah-masalah lain diantaranya: Minimnya peran Pemerintah Desa Pakkat dalam mendampingi petani dalam memberikan bimbingan dan pelatihan secara rutin. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini ingin mengetahui Peran Pemerintah Desa Pakkat dalam Pemberdayaan Kelompok Tani dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Pakkat dalam pemberdayaan kelompok tani ditinjau dari aspek pertama yaitu: Regulator tentang pemberdayaan kelompok tani masyarakat pada umumnya tidak mengetahui tentang aturan dan kebijakan yang mengikat masyarakat untuk diberdayakan. Yang kedua aspek dinamisator yang kemudian didalamnya terdapat subindikator (1) sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan dan (4) Kunjungan lapangan, menunjukkan bahwa dari subindikator yang disebutkan, keseluruhan sub indikator masih kurang efektif sehingga perlu perbaikan kedepannya. Yang terakhir yaitu: aspek Fasilitator ketersediaan bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya bahwa pemerintah sebagai ujung tombak harapan masyarakat sudah berupaya memberikan yang layak dengan memenuhi beberapa alat dan kebutuhan lainnya.

Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan, Kelompok Tani.

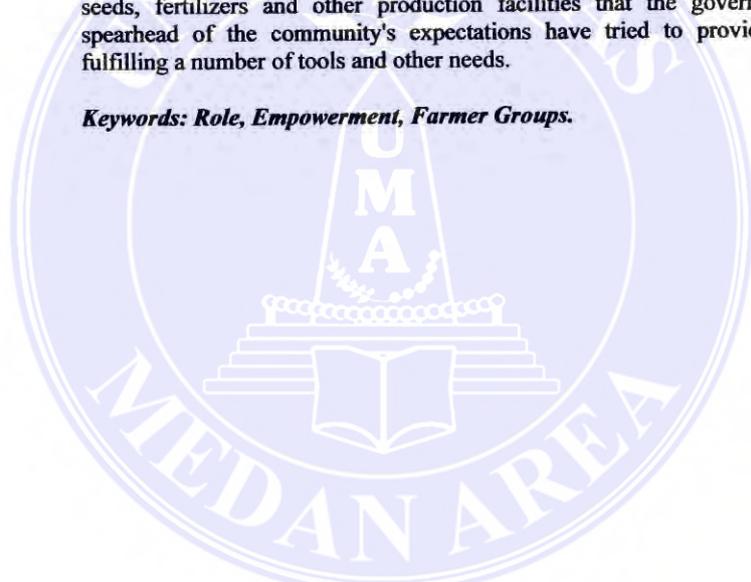


ABSTRACT

As one of the villages in Humbang Hasundutan District, the Pakkat Village Government has an important responsibility and role in empowering farmer groups to be qualified and competitive. But it is not easy to implement, of course, has some problems. Based on the results of observations made by the author in Pakkat Village, other problems were found including: The minimal role of the Pakkat Village Government in assisting farmers in providing guidance and training on a regular basis. So the formulation of the problem in this study wants to know the Role of the Pakkat Village Government in Empowering Farmer Groups using a qualitative approach.

The results of the study show that the role of the Pakkat Village Government in empowering farmer groups is viewed from the first aspect, namely: Regulators regarding the empowerment of community farmer groups generally do not know about the rules and policies that bind the community to be empowered. The second is the dynamic aspect, in which there are sub-indicators (1) outreach, (2) assistance, (3) training and (4) field visits, showing that of the sub-indicators mentioned, all sub-indicators are still ineffective, so further improvement is needed. The last one is: the Facilitator aspect of the availability of seeds, fertilizers and other production facilities that the government as the spearhead of the community's expectations have tried to provide proper by fulfilling a number of tools and other needs.

Keywords: *Role, Empowerment, Farmer Groups.*



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hikmat dan kebijakan serta Rahmat karunianya sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan dan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritikan dan bimbingan penulis harapkan dari semua pihak untuk kesempatan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadan, M.Eng, Sc
2. Bapak Dr. Walid Musthafa, S.IP, M.IP Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
4. Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi untuk pelaksanaan Seminar Hasil
5. Ibu Evi Yunita Kurniaty S.Sos, MIP Selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak saran dan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini

6. Ibu Riri Rezeki Hariani, S.Sos, MAP selaku sekretaris yang telah memberikan saran untuk penyempurnaan skripsi ini
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan

Demikian ucapan terimakasih ini dibuat dengan sebaik-baiknya.

Medan, Maret 2024

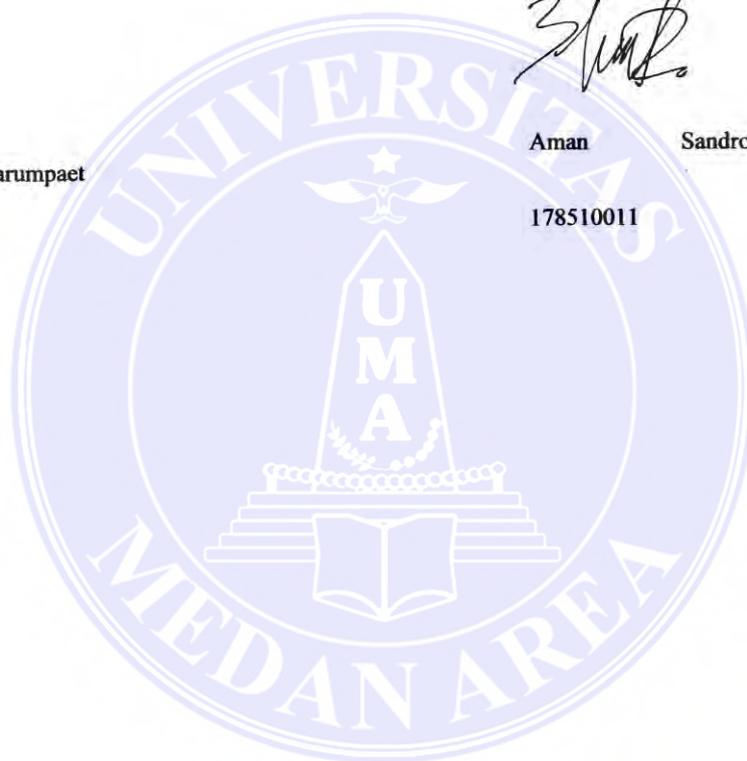


Sarumpaet

Aman

Sandro

178510011



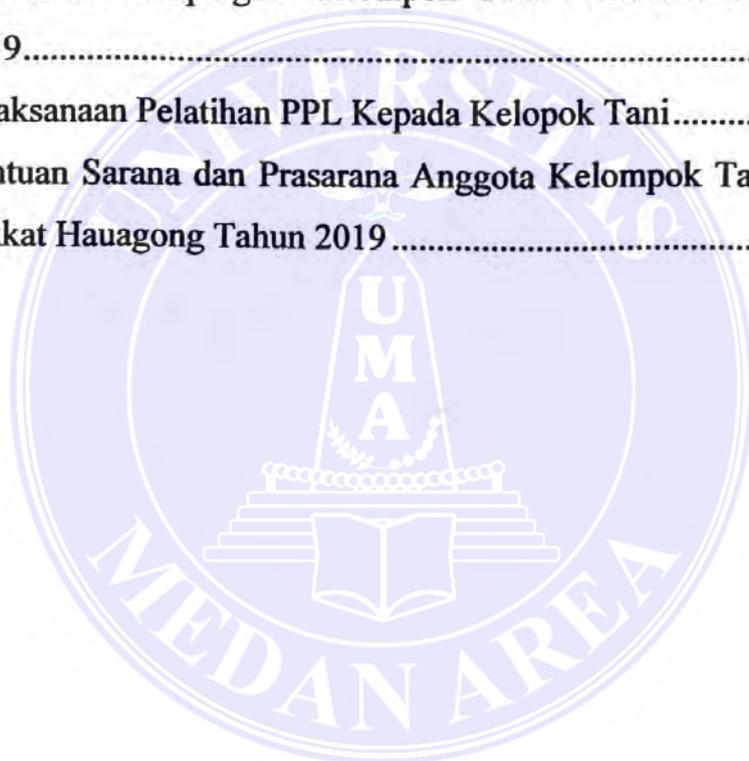
DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pengertian Peran	7
2.2. Peran Pemerintah	8
2.3. Pemberdayaan	12
2.4. Kelompok Tani	16
2.5. Penelitian Terdahulu	17
2.6. Kerangka Berpikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1. Jenis Penelitian	23
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.2.1. Lokasi Penelitian	23
3.3. Informan Penelitian	24
	vi

3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5. Metode Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
4.1. Hasil Penelitian	28
4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Humbang	28
4.1.2. Letak Geografis Kabupten Humbang Hasundutan	30
4.1.3. Kondisi Geografis Desa Pakkat	32
4.1.4. Visi dan Misi.....	32
4.1.5. Pemerintahan Desa Pakkat.....	33
4.1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Pakkat Hauagong.....	36
4.2. Hasil Pembahasan	37
4.2.1. Peran Pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan kelompok tani.....	38
4.2.2. Peran Kepala Desa sebagai dinamisator dalam Pemberdayaan Kelompok Tani	42
4.2.3. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani.....	60
BAB V PENUTUP.....	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1. Waktu Penelitian	24
Tabel 4.1. Jenis Kabupaten	28
Tabel 4.2. Pembagian wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan	31
Tabel 4.3. Pelaksanaan Sosialisasi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Pakkat Tahun 2019.....	45
Tabel 4.4. Jadwal Pendampingan Kelompok Tani Desa Pakkat Tahun 2019.....	50
Tabel 4.5. Pelaksanaan Pelatihan PPL Kepada Kelopok Tani.....	54
Tabel 4.6. Bantuan Sarana dan Prasarana Anggota Kelompok Tani Desa Pakkat Hauagong Tahun 2019	65



DAFTAR GAMBAR

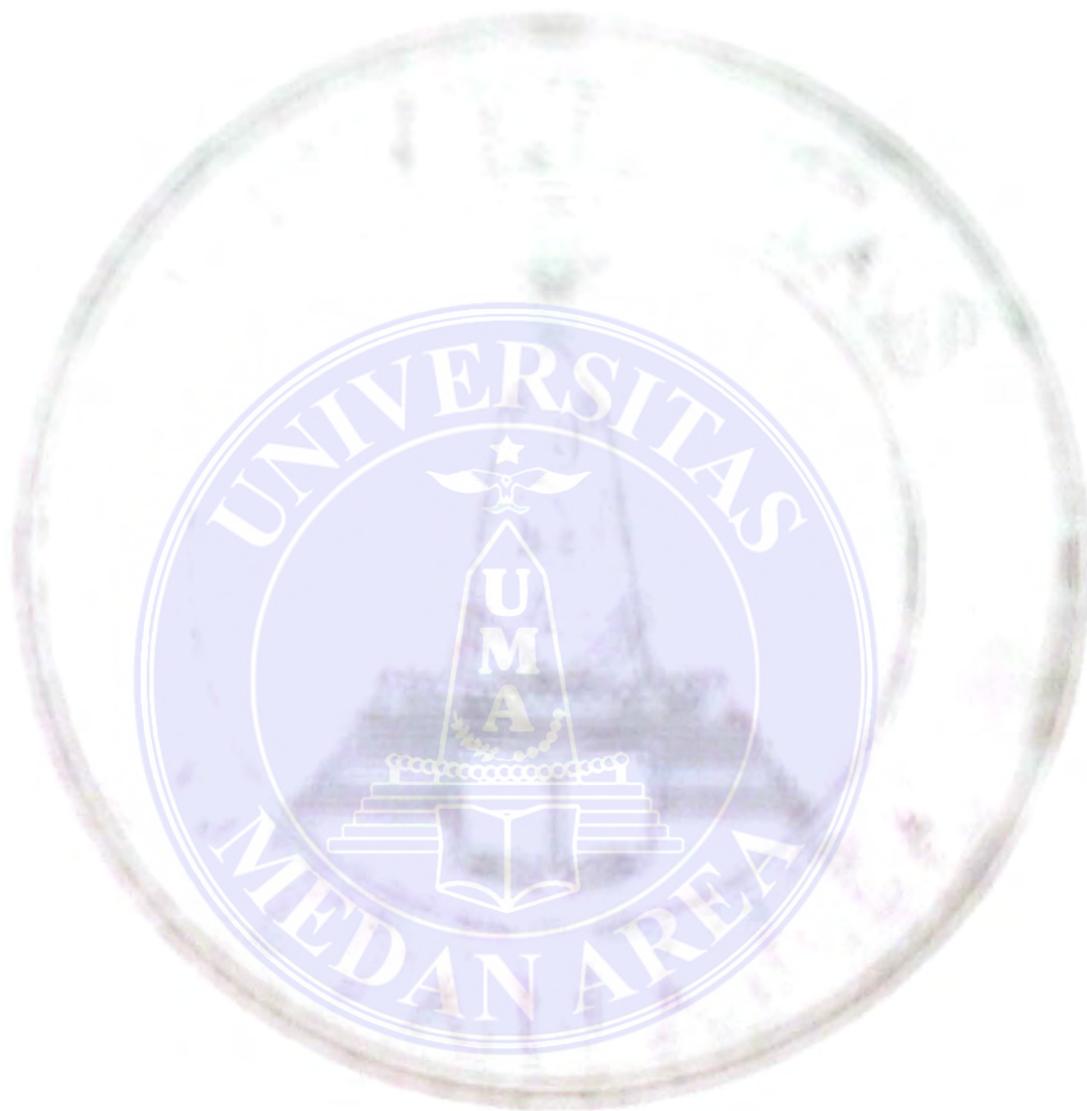
Gambar 4.1 Struktur Pengurus Desa Pakkat Hauagong..... 35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Dokumentasi Pertanian Kabupaten Humban Hasuduntan.....	72
Lampiran II : Kelompok Tani Kabupaten Humban Hasuduntan.....	73





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)25/10/24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pemerintah sebagai pelaksana utama dalam suatu Negara memiliki peranan penting dalam proses pembangunan dan keberlangsungan ke depannya, baik dalam pertumbuhan sumber daya manusia, perkembangan infrastruktur dan aspek lainnya. Oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara kemajuan suatu Negara, serta penggerak bagi terwujudnya kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Pemerintah sebagai ujung tombak keberlangsungan suatu Negara, tentunya memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan daya saing masyarakat. Di era Globalisasi saat ini, tentunya perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi menuntut masyarakat untuk dapat mengikuti prosesnya dan menggali potensi yang ada dalam diri individu. Oleh karena itu, Pemerintah diharuskan berperan aktif dalam mengawasi perkembangan masyarakat dengan membimbing masyarakat untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai Warga Negara Indonesia. Keberadaan Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi masyarakat dalam menstraformasikan segala bentuk keputusan yang telah diambil.

Masyarakat merupakan suatu objek utama dalam keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya. Berhasil atau gagal nya pemerintah dapat di ukur dari tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat. Selain

itu pemerintah harus mampu melibatkan semua sektor dalam proses pembangunan masyarakat agar memahami keluhan dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Salah satu program pengembangan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan masyarakat saat ini ialah melalui program pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang belum berkembang sebagai pihak atau sasaran yang harus diberdayakan, dan pribadi yang dikembangkan dengan perbedaan atau nama lain. Elit pemerintah yang berperan memberdayakan masyarakat.

Kehadiran pemerintah merupakan salah satu jawaban akan pentingnya peran pemerintah baik pusat dan daerah dalam memberikan sumbangsi yang dinilai cukup membangun dan memberdayakan masyarakat sesuai yang diharapkan sesuai dengan orientasi kemajuan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat berharap kesediaan dan totalitas kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah terendah (Desa) sebagai garda terdepan dalam membantu, membina dan memberdayakan sector pertanian. Bukan hanya itu saja, pemerintah juga sebagai media dan tempatnya informasi yang diharapkan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam mewujudkan harapan masyarakat atau petani dalam menangani kelemahan masyarakat dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan kelompok tani tersebut (Labolo, 2010:36).

Melihat berbagai problematika naik turunnya taraf hidup masyarakat saat ini, Pemerintah tertarik membuat regulasi dalam bidang pertanian dengan membuat Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pembinaan Kelembanggaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang tertuang pada bab III menjelaskan bahwasannya dalam hal mengembangkan kekuatan organisasi kemasyarakatan, maka pemerintah sebagai aparatur Negara memiliki kewajiban dalam membantu dan mengarahkan berbagai bentuk kegiatan yang sudah terencana seperti memberikan fasilitas, memberikan dorongan dan apresiasi serta memberika edukasi dan pelatihan secara langsung. Mengacu pada peraturan diatas, harusnya pemerintah berupaya melakukan pembinaan secara menyeluruh dan rutin kepada seluruh kelompok tani di berbagai daerah pelosok (Desa) demi terwujudnya pola pengembangan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan regulasi diatas ialah Kabupaten Hasundutan yang telah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani yang berbunyi “penyuluhan dan pendampingan meliputi tata cara budidaya, pengolahan, pemasaran, analisis kelayakan usaha, kemitraan, serta akses permodalan, serta pada bagian keempat mengatur mengenai pengembangan sistem serta sarana dan pemasaran hasil pertanian bahwa pemerintah daerah selaku pelaksana tugas pemberdayaan kepada petani harus mampu melakukan pemberdayaan melalui pengembangan sistem dan sarana prasaranana pemasaran meliputi, penyediaan pasar, mewujudkan fasilitas pertanian, serta pengembangan pola kemitraan petani”.

Sebagai salah satu Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan, maka Pemerintah Desa Pakkat memiliki tanggung jawab dan peran yang penting dalam memberdayakan kelompok tani agar berkualitas dan mampu berdaya saing. Namun hal tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan, tentunya memiliki beberapa

permasalahan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis di Desa Pakkat masih ditemukannya masalah-masalah lain yaitu :

1. Minimnya peran Pemerintah Desa Pakkat dalam mendampingi petani dalam memberikan bimbingan dan pelatihan secara rutin
2. Kurang terlibatnya Pemerintah Desa Pakkat turun ke lapangan, sehingga pemerintah tidak mengetahui hal-hal mendasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat
3. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang regulasi pemerintah pusat dan daerah tentang kelompok tani
4. Minimnya kegiatan program-program pelatihan masyarakat kelompok tani di Desa Pakkat.

Mengamati kondisi tersebut, tidak diragukan lagi jika petani yang ada di desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan sering mengalami kesulitan, hal inilah yang membuat masyarakat setempat membutuhkan sosok dan peran dari pemerintah Desa, Jika ditinjau dari sudut pandangan area pertanian khususnya kelompok tani yang ada di Desa Pakkat memiliki lahan pertanian yang luas yang mampu dikelola namun tidak dapat bermanfaat secara menyeluruh sesuai target yang seharusnya di capai demi keberhasilan perkembangan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan kelompok tani tentunya bukan hanya terjadi di Desa Pakkat saja, namun hampir diseluruh pendesaan, keterkaitan peran pemerintah desa dengan pemberdayaan kelompok tani adalah 2 (dua) hal tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan fenomena dan situasi yang terjadi di Desa Pakkat sesuai yang sudah dijabarkan diatas dapat kita simpulkan masih minimnya peran pemerintah desa

dalam mengelola dan memberdayakan masyarakat setempat serta lemahnya hubungan dan kerjasama dari masyarakat dengan pemerintah dalam mengembangkan sector pertanian di Desa Pakkat. Hal demikian yang akhirnya melatarbelakangi penulis untuk meninjau dan menganalisis kondisi kelompok tani dengan judul penelitian *“Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan”*.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas,maka penulis bermaksud membuat rumusan masalah ialah : Bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Pakkat Hauagong Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat tujuan penelitian sebagai berikut ini : Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Pakkat Hauagong Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dijadikan sebagai bahan referensi serta perubahan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan selanjutnya memperdalam ilmu pemerintahan desa

2. Manfaat Praktis

Selain memiliki manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi pemerintah khususnya Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberdayakan kelompok tani yang ada di Desa Pakkat Hauagong.

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk peneliti dalam menambah dan meningkatkan mutu dan pengalaman serta perbaharuan untuk kedepannya.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/10/24

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran

Peran adalah suatu kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari bahkan yang kita lakukan setiap harinya. Namun demikian, masih banyak masyarakat awam yang belum memahami maksud dan maknanya. Seorang ahli yang bernama Merton (Raho, 2007: 67) menyampaikan bahwa peran ialah perilaku seseorang atau pimpinan yang diinginkan masyarakat ketika menduduki suatu jabatan, hal ini tentunya berhubungan dengan status sosial tertentu. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto (2013: 212) mengungkapkan peran sebagai suatu bentuk dari tingkah laku individu dalam berinteraksi pada suatu kondisi tertentu. Dapat diartikan peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari berasal dari seseorang sejak ia lahir. Pada hakekatnya peran juga dapat dikatakan rangkaian tingkah laku yang dimunculkan oleh kondisi sosial maupun lingkungan.

Tidak hanya pendapat para ahli diatas, pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Duverger (2010:103) yang berpendapat bahwa peran (*role*) sudah dipilih secara baik dan bijak karena pada umumnya setiap orang ialah pemain dimana ia hidup. Bukan hanya itu saja, peran seolah-olah juga disebut sebagai aktor yang harus memainkan beberapa peranan layaknya aktor-aktor profesional. Berbeda dari pendapat diatas, Poerwodarminta (2003:571) berpendapat bahawa peran suatu tindakan nyata dilakukan oleh individu atau

sekelompok orang dalam suatu waktu/kejadian. Berdasarkan pendapat Poerwodarminta dapat kita ketahui bahwa tingkah laku yang seseorang lakukan di situasi tertentu untuk menunjukkan perannya.

Menurut Wulansari, (2009:106) peran suatu gambaran daripada perbuatan seseorang atas apa yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dengan melihat tuntutan dan perkembangan nilai etika dalam lingkungan sosial dan struktur sosial di masyarakat.

2.2.Peran Pemerintah

Pemerintah secara umum dapat dikatakan sebagai aparatur yang berkewajiban melayani masyarakat. Menurut pamudji (2012:22-23) pemerintah berasal dari kata pemerintah, sedangkan arti kata pemerintah berasal dari kata perintah. Namun berbeda halnya dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI kata-kata tersebut mempunyai arti yakni, perintah adalah ucapan yang dilakukan dalam arti memberikan arahan atau sering disebut menyuruh kepada seseorang. Pemerintah ialah kekuasaan yang memerintah suatu Negara. Selanjutnya pengertian pemerintah adalah suatu tindakan perilaku ataupun tindakan dalam memerintah.

Tidak hanya sampai disitu, para ahli lainnya seperti Bahtiar (2011:8) juga menyampaikan pendapatnya tentang peran, berbicara peran tidak luput dari tindakan seseorang yang didalamnya memiliki sisi dinamis ketika memiliki kedudukan. Ketika individu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang ada maka dapat dikatakan bahwa ia telah memenuhi perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada bab 3 yang berbunyi bahwa kekuasaan Peran pemerintah salah satu kebutuhan mutlak

dalam suatu organisasi baik swasta ataupun pemerintah dan menjadi salah satu fungsi utama yang harus dilakukan oleh pucuk pimpinan yang menjadi pemimpin organisasi.

Dalam mengembangkan peran pemerintah dalam memajukan dan membangun Negara Indonesia, maka pemerintah memerlukan peranan yang aktif dalam mengelola dan melayani masyarakat agar dapat mengetahui potensi-potensi yang dimiliki masyarakat. Menurut menurut Labolo (2010:36) ada tiga dasar peran pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan ialah bentuk yang diberikan oleh pemerintah sebagai pemberi jasa pelayanan kepada masyarakat dan tidak dapat dipungkiri sebagai bentuk abdi Negara dalam hal pertahanan dan keamanan Negara yang berguna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan yaitu pemerintah sebagai penyedia kebutuhan masyarakat dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang tidak belum terpenuhi, Karena keterbatasan kemampuan dan ketidakberdayaan masyarakat dalam hal sarana dan prasarana, maka ada 3 (tiga) peran pemerintah dalam pemberdayaan yaitu:

a. Peran pemerintah sebagai *regulator*

Pemerintah sebagai *regulator* dimaksudkan bahwa sebagai pemerintah pedoman dasar yang dipedomani oleh masyarakat serta memiliki tanggungjawab yang mampu menggerakkan dan menyiapkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam hal penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan serta mampu menerapkan peraturan terhadap masyarakat guna dalam meningkatkan kualitas dan taraf kehidupan masyarakat agar tertib dalam mematuhi peraturan yang ada

Kemudian peran tersebut dikembangkan dengan mengacu pada peraturan dan prosedur yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa terkait dengan aturan atau mekanisme harus mampu diwujudkan oleh pemerintah agar menjadi sebuah panduan yang dirancang oleh pemerintah dalam memberikan batasan kepada setiap individu atau kelompok masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga peraturan tersebut yang sudah dibuat berupa kebijakan dan aturan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

b. Peran pemerintah sebagai *dinamisator*

Pemerintah sebagai *dinamisator* sebagai bentuk usaha pemerintah dalam memberikan motivasi untuk masyarakat agar bisa bergerak serta ikut terlibat dalam dalam proses pembangunan dan pemeliharaan pembangunan daerah setempat. Peran pemerintah sebagai *dinamisator* berfungsi untuk memberikan bimbingan dan pengarahan yang menyeluruh kepada masyarakat secara efektif tanpa melihat adanya perbedaan strata sosial masyarakatnya. Melihati situasi

itu, maka kebutuhan masyarakat yang masih banyak belum terpenuhi dan membutuhkan peran besar dari pemerintah dalam memelihara kesatuan masyarakat serta menjaga dinamika/kestabilan pemerintah dalam menjalankan perannya terhadap masyarakat.

Untuk itu *dinamisator* kemudian diuraikan dalam beberapa aspek, yaitu :

1. Sosialisasi
2. Pendampingan
3. Pelatihan
4. Kunjungan lapangan

Sosialisasi merupakan suatu proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Pendampingan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan tenaga ahli pemberdayaan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat serta mendorong dan memberi semangat kepada masyarakat.

c. Peran pemerintah sebagai *fasilitator*

Peran pemerintah sebagai *fasilitator* merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi para pelaksana pembangunan dan berperan untuk menghubungkan harapan dari pemerintah selaku aparatur pemerintah dengan masyarakat sebagai salah satu penggerak dan memiliki peran dalam mengoptimalkan kegiatan pembangunan daerah. Sebagai *fasilitator* maka pemerintah berkewajiban menjadi agen/pemain yang memiliki peran untuk menciptakan dan memberi fasilitas sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi yang aman, tenang dan tertib. Dalam hal ini dapat berupa perlengkapan sarana dan prasarana yang lengkap, ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Namun hal yang sangat khusus ialah Pemerintah harus menjadi penggerak dalam mendampingi kelompok tani melalui edukasi baik berupa pelatihan keterampilan, peningkatan pendidikan dan pendanaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.3. Pemberdayaan

Secara kajian, pemberdayaan atau yang sering disebut pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata “power” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Maka dalam kajian ini pemberdayaan ialah interaksi yang dilakukan secara langsung terkait kekuasaan (*power*), sehingga hal ini menyebabkan kekuasaan menjadi objek penting yang selalu berhubungan dengan keahlian yang dimiliki seseorang untuk memaknai kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain sesuai keinginannya dan mengesampingkan keinginan orang tersebut (Suharto, 2014:57). Dengan demikian, program pemerintah dalam hal pemberdayaan mempunyai patriarki yang kuat di dalam kehidupan masyarakat khususnya Indonesia yang pada akhirnya menjadi satu faktor penghambat dalam pemberdayaan (Hastuti dan Respati 2009).

Pemikiran lain datang dari Ife dalam (Suharto 2014:58) yang mengungkapkan bahwa pemberdayaan memiliki 2 (dua) definisi yang memuat tentang kekuasaan dan kewenangan sebagai pemegang kendali oleh setiap kelompok yang berada di bawah dan siap menerima arahan dari perintah yang diberikan oleh atasan atau pihak yang berkuasa.

Konsep pemberdayaan tidak terlepas dari konsep utamanya yaitu power (daya). Dijelaskan oleh Suriadi (2005:54-55) bahwa terkait dengan konsep pemberdayaan power dapat di pahami dan di jelaskan dalam empat sudut pandang yaitu perspektif pluralis, prespektif elitis, prespektif strukturalis, dan prespektif post-strukturalis. Pemberdayaan ditinjau dari sudut pandang prespektif pluralis merupakan proses untuk mendorong kelompok individu maupun masyarakat yang kurang beruntung untuk bersaing secara sehat dan adil serta efektif dengan berbagai kepentingan dengan tujuan agar masyarakat lebih merasa memerlukan kegiatan untuk belajar tentang bagaimana menggunakan keahlian melalui objek tertentu seperti media dan sebagainya yang berhubungan dengan tindakan politik, pemberdayaan masyarakat ditinjau dari Prespektif elitis merupakan suatu upaya untuk bergabung dan memengaruhi elit-elit, membentuk aliansi dengan elitis serta melakukan konfrontasi dan kerjasama antar lini untuk mencari perubahan pada elitis. Kurang berdayanya masyarakat dikarenakan adanya power dan kontrol yang besar dari para elit terhadap media, pendidikan, partai politik, birokrasi dan sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat juga ditinjau dari sudut pandang prespektif strukturalisasi dimana suatu agenda yang menantang dan dapat dicapai jika bentuk dari kepentingan yang terdapat di struktural dapat dieliminasi, sehingga masyarakat tak berdaya merupakan suatu bentuk struktur dominan yang melakukan penindasan masyarakat, seperti permasalahan kelas sosial, perbedaan gender, suku, ras dan sebagainya. Dengan kata lain bahwa perbedaan masyarakat merupakan suatu proses pembebasan dan perubahan struktural secara fundamental. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat ditinjau dari prespektif

poststruktural adalah suatu proses yang menentang dan mengubah diskursus sehingga pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualisasi ketimbang aktivitas aksi atau pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk upaya pengembangan pengertian terhadap pengembangan pemikiran baru.

Sekumpulan individu yang bernaung dalam suatu tempat disebut masyarakat, yang dimana masyarakat tersebut memiliki perasaan dan rasa yang sama dalam menduduki suatu daerah yang kemudian bersosialisasi dengan manusia lainnya dan berbagi pengetahuan yang ia miliki. Dimana manusia secara dasarnya ialah makhluk sosial ciptaan Tuhan yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan hidup dalam kehidupan sosial. Hal ini lantas membuat manusia harus mempunyai kebutuhan mendasar yang bersampingan dan menyatu dalam sebuah kelompok dalam masyarakat, kemudian untuk menjalani hidup di kelompok masyarakat maka memerlukan individu lainnya yang sebenarnya sama sama memiliki kepentingan dan kebutuhan. Keterkaitan satu sama lain sebagai makhluk hidup tentunya untuk mencapai satu kesamaan yaitu sama sama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan mampu bersosial dengan lingkungannya.

Pandangan selanjutnya tentang pemberdayaan menyampaikan bahwa hal ini suatu isu yang saat ini menjadi perbincangan hangat yang sering menuai pro dan kontra yang tidak mampu ditanggapi dan diselesaikan secara bijak pada masyarakat, khususnya masyarakat desa serta kawasan terpencil, bahkan terbelakang. Pemberdayaan pada dasarnya memposisikan masyarakat sebagai titik utama dan perhatian serta pemeran utama dalam proses pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan. Paradigma pemberdayaan salah satu bagian yang

berkaitan dengan pembangunan yang berfokus pada warganya untuk menciptakan dan memotivasi warganya dalam mewujudkan kemakmuran (Alfitri, 2011:21).

Penjelasan lanjutan juga dikemukakan oleh Suhendra (2006:74-75) mengenai pemberdayaan. Beliau mengatkaan bahwa pemberdayaan suatu proses yang pada akhirnya menjadi bentuk aktivitas yang berangsur dilakukan oleh masyarakat seiring berjalannya waktu. Selain itu, hal ini bersinergi dengan semua elemen yang terkait dalam memotivasi potensi yang ada secara evaluatif demi terlibatnya semua kemampuan yang dimiliki. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat dipahami dengan arti bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebar kekuasaan melalui pemberdayaan masyarakat dan organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya sendiri untuk aspek kehidupan yang ada seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pendidikan dan semua aspek.

Kegiatan pemberdayaan di masyarakat di kenal sebagai konsep dalam bentuk pengembangan masyarakat baik secara pengembangan pengetahuan, ekonomi maupun pengembangan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini juga bermaksud untuk mengubah dan mengangkat kedudukan dan martabat baik individu maupun sekelompok masyarakat. Pemberdayaan dalam gambaran sosial budaya yang berusaha menerapkan pembangunan terus berupaya untuk menumbuhkan dan membangkitkan semangat juang masyarakat, meningkatkan nilai ekonomi dan kehidupan sosial.

2.4. Kelompok Tani

Kelompok tani merupakan sebuah lembaga yang terbentuk dari pertanian dan peternakan yang kemudian dibentuk atas dasar kesamaan dan kesatuan yang mengikat dan memiliki kepentingan, dan persamaan dalam lingkungan sosial, budaya dan ekonomi. Serta berupaya menumbuhkan usaha anggotanya, dimulai dari pengenalan, pendekatan dan saling percaya satu sama lain sehingga mampu bersinergi dalam mewujudkan lahan usaha tani (Pusat Penyuluhan Pertanian, 2012).

Pendapat lainnya juga menyampaikan bahwa kelompok tani yang sudah dibentuk dan memiliki tujuan yang sama, bersama-sama untuk menyatukan dan menghubungkan seluruh tani berdasarkan asas sosial, ekonomi dan gendernya (Syahyuti, 2007). Dengan demikian, untuk mengali dan memahami gerak dari proses peningkatan pertanian perlu mendapat perhatian khusus terhadap semua kelompok tani yang ada di desa (Hariadi, 2011).

Kelompok tani memberikan arti tentang bagaimana sebuah lembaga sosial di tingkat petani dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam berorganisasi sesuai dengan hukum yang berlaku (Hermanto dan Swastika, 2011). Kelompok tani pada hakikatnya sebuah usaha yang menggerakkan sumber daya manusia petani, dengan cara melakukan pembinaan kelompok tani, meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani (Thomas, 2008). Usaha-usaha tersebut akan dapat membantu Kelompok tani agar tergabung sebagai anggota tani yang mampu bermanfaat mulai dari proses pembelian sarana produksi hingga pengelolaan pasca panen dan pemasarannya (Hariadi, 2011).

Orang-orang yang berkumpul disebut sebagai kelompok. Kelompok tani di era globalisasi saat ini menjadi titik fokus untuk melaksanakan dan menerjemahkan ruang lingkup hak dan kewajiban petani dalam pengambilan kebijakan, strategi dan program yang memiliki satu kesatuan yang utuh dalam rangka pengembangan (Djiwandi, 1994).

2.5. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Metode	Hasil
Ita Ulumiyah	Peran Pemerintah Desa dalam Perberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)		Penelitian ini mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam memberdayaan masyarakat Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. berdasarkan kenyataan yang ada desa Sumberpasir merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani serta tingkat pendidikan masyarakat yang usia produktif cenderung masih rendah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan

		<p>observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sumber pasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan yaitu: pertama pengaktifan kelembagaan, kedua peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, perlombaan desa, musrenbang desa serta pembangunan Fisik, ketiga peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan pande besi dan pelatihan bordir. akan tetapi dalam melaksanakan upaya Pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Sumberpasir mengalami kendala-kendala diantaranya partisipasi masyarakat yang kurang, budaya malas serta kurangnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan.</p>
<p>Gleydis Susanti Oroh</p>	<p>Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelompok</p>	<p>Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi</p>

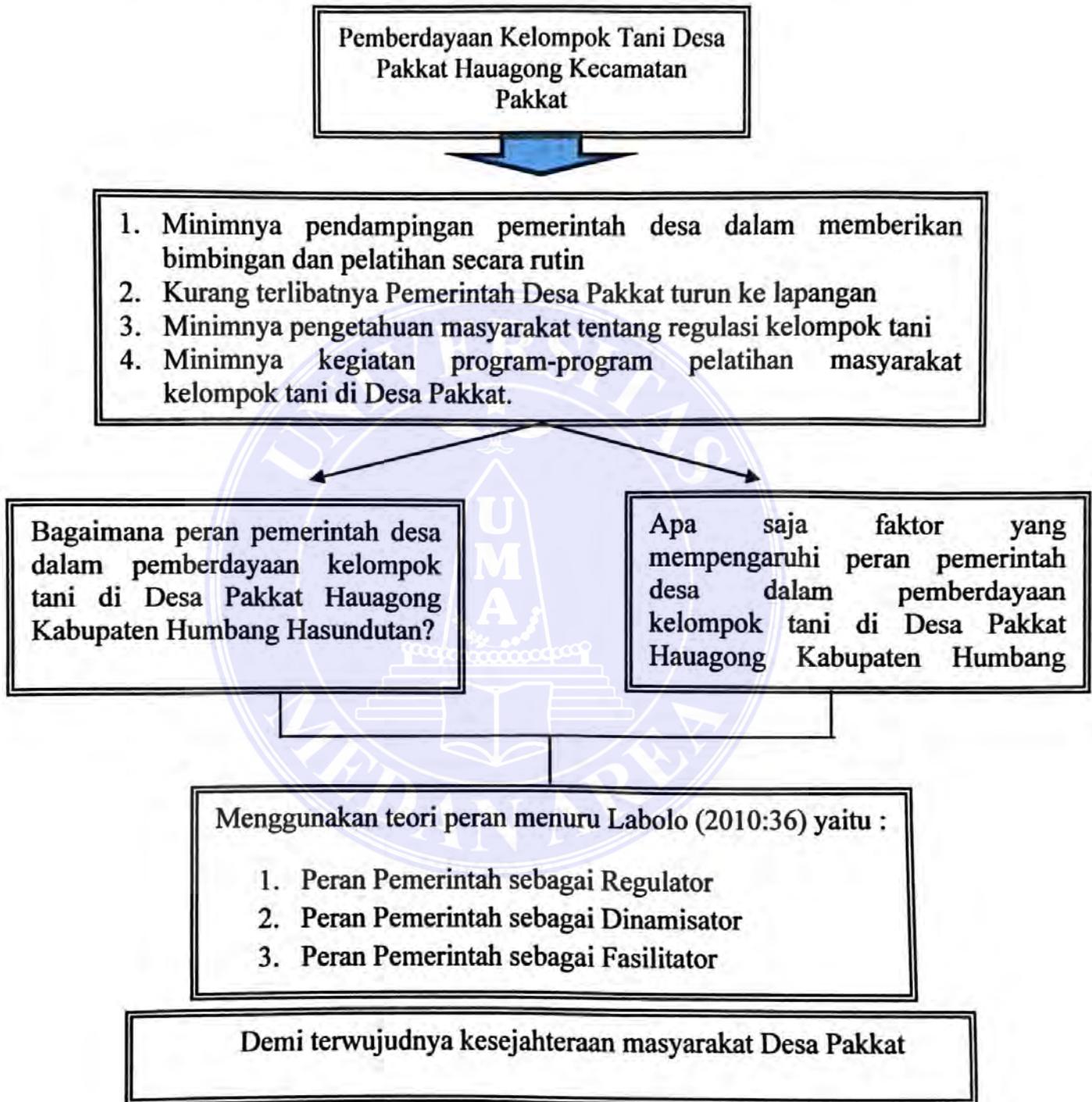
	<p>Masyarakat di Bidang Pertanian Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa</p>	<p>kesejahteraan masyarakat. Lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab. Penelitian dengan topik Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian, bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di bidang pertanian serta mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan peranan pemerintah</p>
--	--	---

		<p>desa dalam pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: Peranan pemerintah desa dalam pembinaan. Pembinaan kehidupan masyarakat desa dilakukan oleh Pemerintah desa dengan menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat sendiri. Peranan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pengembangan kepada masyarakat seperti dalam kegiatan disektor pertanian maka kontribusi yang sangat besar dalam bidang pertanian adalah aktivitas usaha tani. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan menunjukkan bahwa pemerintah sangat berperan dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya dibidang pertanian.</p>
<p>Yana Sahyana</p>	<p>Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, berdasarkan Padahal, sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Sukamulya adalah bertani dan tingkat masyarakat pendidikan di usia produktif cenderung di bawah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data.</p>

		<p>Teknik yang digunakan adalah observasi wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sukamulya dapat memberdayakan masyarakat melalui beberapa program pembangunan adalah; Yang pertama adalah aktivasi institusi, yang kedua adalah peningkatan public partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong, musrenbangdes desa dan pembangunan fisik. Yang ketiga adalah peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pelatihan pandai besi dan bordir.</p> <p>Namun dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Sukamulya memiliki beberapa kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat, budaya malas dan fasilitas yang tersedia untuk mendukung kegiatan pembangunan.</p>
--	--	---

2.6. Kerangka Berpikir

Dengan munculnya temuan dalam penelitian ini, maka penulis membuat kerangka berpikir sebagai suatu konsep dalam menggambarkan hasil penelitian.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/10/24

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif, pemilihan jenis ini bertujuan agar mempermudah memperoleh informasi dari dari berbagai narasumber yang dijadikan sebagai data utama. Sementara itu menurut David Williams (Moleong, 1995:5) penelitian kualitatif segala usaha peneliti dalam mengumpulkan data dari sumber yang alamiah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Metode deskriptif kualitatif ini hanya akan menggambarkan satu situasi atau peristiwa. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan, melukiskan keadaan terkini di sekitar objek penelitian berdasarkan munculnya fakta-fakta dan data yang diperoleh untuk meyelidiki dan melakukan pemecahan masalah melalui wawancara dan memaparkan pertanyaan kepada narasumber dan mendapatkan dati dari hasil tanya jawab tersebut.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan objek yang diteliti, dimana lokasi penelitian merupakan hal terpenting dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasudutan.

Penelitian ini dilaksanakan bulan Juni 2022 sampai dengan November 2022.

Tabel 3.1 : Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Juni 2022	Juli 2022	Agst2 022	Sept2 022	Okt 2022	Nov 2022	Nov 2022
1	Penyusunan proposal							
2	Seminar proposal							
3	Perbaikan proposal							
4	Pengambilan Data							
5	Penyusunan skripsi							
6	Seminar hasil							
7	Perbaikan Skripsi							
8	Sidang meja hijau							

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan sumber informasi yang mengetahui kondisi lapangan dan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dengan demikian, informan haruslah individu yang langsung berhadapan dengan objek penelitian. Menurut Bagong Suyatno (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Informan Kunci (*Key Informan*) ialah mereka yang memahami berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Disini yang menjadi informan Kunci adalah Kelompok tani yang ada di desa Pakkat Hauagong
2. Informan Utama yaitu mereka yang derdekatan dalam lingkungan sosial yang akan diteliti oleh peneliti, yang menjadi informan utama adalah Pemerintah Desa Pakkat Hauagong
3. Informan Tambahan ialah mereka yang paham dan memiliki berbagai informasi walaupun tidak berada dalam lingkungan tersebut, adapun yang menjadi informan tambahan adalah masyarakat di Desa Pakkat Hauagong

3.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Sementara itu, menurut Supriadi (2011:98) observasi ialah suatu teknik dalam mengumpulkan data yang bersifat *naturalistic* yang berhubungan dan terjadi di lingkungan alam, dimana pelakunya secara aktif ikut terlibat. Kemudian menurut Widoyoko (2014:46) menyampaikan bahwa observasi suatu pengamatan atau pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu usaha untuk mengetahui gambaran dalam dalam penelitian. Pendapat lainnya juga disampaikan oleh Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) bahwasannya wawancara ialah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau individu dalam bertukar pikiran atau informasi

dengan cara Tanya jawab, sehingga dari percakapan tersebut dapat diperoleh informasi dan dan kesimpulan dari permasalahan yang ada, dalam metode kualitatif, wawancara ialah salah satu metode yang efektif untuk memperoleh informasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti, menurut Sugiyono (2015:83) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau yang berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya momentum dari seseorang. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil dokumentasi berupa gambar bersama dengan narasumber, atau sedang mewawancarai narasumber.

3.5. Metode Analisis Data

Menurut Stainback dalam Sugiyono (2015:88) analisis data merupakan hal yang penting dan bersifat kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis data merupakan cara dalam menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan dan dokumentasi dalam menjawab pembahasan yang akan dipelajari serta mampu membuat kesimpulan yang mudah dipahami, dimengerti penulis dan orang lain (Sugiyono, 2014:244).

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah menurut Miles dan Huberman (2012:255) di antaranya ialah :

a. Pengumpulan Data

Aanalisis data dilakukan dengan melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan dan dokumentasi serta alat bantu pendukung

lainnya. Data yang sudah dikumpulkan berupa penjelasan dan jawaban dari informan mengenai masalah yang terjadi dalam kelompok tani.

b. Reduksi Data

Reduksi merupakan tahap dari teknik analisis data dalam bentuk penyederhanaan, penggolongan, dan menyaring data sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas mudah, dan dapat dipergunakan dengan baik.

c. Penyajian Data

Penyajian data sebagai kumpulan informasi yang sudah tersusun dalam melakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Penyajian data juga merupakan penyederhanaan informasi agar mudah dipahami oleh para pembacanya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan adanya penyajian data yang berasal dari rumusan masalah serta tujuan penelitian ialah untuk mengetahui peran dan hambatan dari pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Pakkat.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/10/24

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis membuat kesimpulan dan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Peran Pemerintah Desa Pakkat dalam pemberdayaan kelompok tani ditinjau dari aspek pertama yaitu: Regulator tentang pemberdayaan kelompok tani masyarakat pada umumnya tidak mengetahui tentang aturan dan kebijakan yang mengikat masyarakat untuk diberdayakan. Yang kedua aspek dinamisator yang kemudian didalamnya terdapat subindikator (1) sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan dan (4) Kunjungan lapangan, menunjukkan bahwa dari subindikator yang disebutkan, keseluruhan sub indikator masih kurang efektif sehingga perlu perbaikan kedepannya. Yang terakhir yaitu: aspek Fasilitator ketersediaan bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya bahwa pemerintah sebagai ujung tombak harapan masyarakat sudah berupaya memberikan yang layak dengan memenuhi beberapa alat dan kebutuhan lainnya, hanya saja masih terbatas dan tidak sesuai dengan jumlah kelompok tani yang ada/terdata.

5.2.Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini guna untuk meningkatkan pengembangan kelompok tani di tahun-tahun berikutnya ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat aksis dan update terhadap seluruh masyarakat dalam berbagai informasi
2. Pemerintah diharapkan mampu sebagai penyedia yang dapat memotivasi dan memberikan arah perkembangan dan kemajuan kepada masyarakat
3. Meningkatkan kegiatan sosialisasi maupun pendamping secara rutin dan menyeluruh kepada seluruh kelompok tani
4. Meningkatkan dan mengelola sarana dan prasarana Desa menjadi lebih baik lagi sehingga mempermudah proses pertanian di Desa Pakkat

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alam, Syamsul. 2012. *Prencanaan Pemerintah Daerah dalam Melestarikan Kebudayaan Tanah Adat Karangpuang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai*. Unismuh Makassar.
- Alfitri. 2011. *Community Development (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana
- Bahtiar, A. M. 2011. *Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pengembangan Partisipatif (Pembangunan Irigasi) di Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara*. Unismuh Makassar.
- Bernard Raho, SVD. 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Davey, K.J, 2008, *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek International dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, Penerjemah Amanullah dkk, UI Press, Jakarta.
- Duverger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Hariadi, Sunarru Samsi. 2011. *Dinamika Kelompok .Teori dan Aplikasinya untuk Analisis Keberhasilan Kelompok Tani Sebagai Unit Belajar, Kerjasama, Produksi dan Bisnis*. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogya karta.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Pamudji, S. S. 2012. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhendra., 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Suriadi, Agus., 2005. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, Medan: Departemen Ilmu Kesejahteraan Ilmu Sosial Fisip USU.
- Thomas, Soedarsono. 2005. *Dinamika Kelompok*. Universitas Terbuka. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Solok, 2013. *Data Produksi Sayur-sayuran pada Kecamatan Lembah Gumanti*.
- Wulansari, Dewi. 2009. *Sosiologi Konsep Dan Teori*. Bandung: PT. Refika

Jurnal:

Hermanto dan Swastika. 2011. Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani. Analisis Kebijakan pertanian, Volume 9 No. 4, Desember 2011 : 371 – 390.

Ita Ulumiyah, Peran Pemerintah Desa dalam Perberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 890-899

Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Perdesaan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Vol 5 No. 1.

Peraturan:

Menteri Pertanian. 2013. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013.

Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Website:

Gleydis Susanti Oroh, (2014). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/6723>

Yana Sahyana, Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat), <http://eprints.ipdn.ac.id/5629/1/Peran%20Pemerintah%20Artikel.pdf>

Lampiran I : Dokumentasi Petani dan Hasil Pertanian Di Kabupaten Humban Hasundutan



Lampiran II : Dokumentasi Dengan Kelompok Tani Humban Hasundutan





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositorv.uma.ac.id)25/10/24